

Kajian Investasi Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PDAM Tirta Mulia
Kabupaten Pemalang tahun 2019-2021

Oleh
Dirgo Wahyono , Sugiarto

Abstrac

Penelitian ini “Kajian Investasi Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang tahun 2019-2021, untuk menyesuaikan dengan pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewenangan penambahan modal BUMD, untuk melakukan penambahan modal BUMD Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan kajian analisis investasi.

Rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap PDAM Tirta Mulia Kab. Pemalang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar 5 (lima) milyar yang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun sebesar sebesar Rp 2.000.000.000 tahun pertama, sebesar Rp 1.500.000.000 untuk tahun ke dua dan tahun ke tiga.

Trend rasio DER cenderung naik pada tahun pertama 11.44%, tahun ke dua 12,29% dan tahun ke tiga sebesar 14,37% memberi indikasi total kewajiban mengalami peningkatan, namun masih pada taraf yang rendah yaitu sebesar seperdelapan dari total modal. Rasio Cash Ratio mengalami penurunan, pada tahun pertama sebesar 182,43%, pada tahun kedua sebesar 164,88% dan pada tahun ketiga sebesar 138,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kas dan bank perusahaan masih mampu membayar total kewajiban, namun dilihat dari persentasi pertumbuhan kewajiban lebih tinggi daripada pertumbuhan kas dan bank. Rasio ROE mengalami peningkatan, pada tahun pertama sebesar 7,68%, pada tahun kedua sebesar 8,31% dan pada tahun ketiga sebesar 8,94%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

pengembalian modal terhadap laba perusahaan mengalami peningkatan, meskipun rasio ROE masih di bawah 10%, namun karena PDAM termasuk dalam perusahaan umum yang melayani kebutuhan air bersih terhadap masyarakat sehingga dengan ROE sebesar 8,94% sudah baik.

NPV menunjukkan nilai positif Rp 2.282.392.201 pada discount faktor 10% didukung adanya kemampuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik, dengan adanya penambahan pelanggan. Profitability Index sebesar 1,46 lebih besar dari 1, maka tambahan investasi dinyatakan layak. Internal Rate Of Return (IRR) 21,68% memiliki nilai lebih besar dari 10% maka dapat dikatakan bahwa investasi layak untuk dilaksanakan. Dari metode analisis di atas yang di pakai dapat di simpulkan bahwa tambahan investasi bisa di terima atau di lanjutkan

Key words: DER, CR, ROE, Net Present value (NPV), Payback Period (PP), Internal rate of return (IRR), Profitability index (PI).

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Pematang seperti daerah lain berupaya berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Pematang. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang dalam penyediaan infrastruktur guna meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dan mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Pematang. Kabupaten Pematang yang berada di wilayah pantura dan sudah terintegrasi dengan jalan tol serta potensi wilayah menjadi daya tarik investor untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Pematang. Dengan pembangunan seperti itu, diharapkan dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang, sejalan dengan perkembangan di dunia yang menargetkan Sustainability Development Goals (SDGs) (tujuan pembangunan berkelanjutan) pada tahun 2030 sebagai kelanjutan dari program Millenium Development Goals (MDGs). SDGs berlaku 2015-2030 berisi 17 tujuan, yaitu (1) menghapus kemiskinan, (2) mengakhiri kelaparan, (3) kesehatan dan kesejahteraan, (4) kualitas pendidikan yang baik, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi, (7) akses ke energi yang terjangkau, (8)

pertumbuhan ekonomi, (9) inovasi dan infrastruktur, (10) mengurangi ketimpangan, (11) pembangunan berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi berkelanjutan, (13) mencegah dampak perubahan lingkungan, (14) menjaga sumber daya laut, (15) menjaga ekosistem darat, (16) perdamaian dan keadilan, (17) revitalisasi kemitraan global.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya adalah penyelarasan dengan visi, misi, dan kebutuhan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kapasitas perekonomian wilayah. BUMD adalah alat ekonomi pemerintah daerah untuk berpartisipasi langsung ke dalam sistem ekonomi berbasis pasar. BUMD Kabupaten Pematang Jaya dibentuk dengan berlandaskan pada Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masa kini. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka sesuai pasal 409 huruf a dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 sudah tidak berlaku.

Peran BUMD sebenarnya bukan hanya sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah. Keberadaan BUMD ini diharapkan juga dapat menciptakan *multiplier effects* bagi perekonomian suatu daerah, antara lain dalam bentuk penyediaan lapangan kerja. BUMD juga membantu memenuhi masyarakat dan pelayanan publik. Salah satu BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya adalah PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pematang Jaya.

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang luas (seluas-luasnya) untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam otonomi daerah diharapkan terjadi pengembangan inovasi

daerah guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing (Pasal 386).

Tabel 1.1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalangan tahun 2015-2017

(dalam ribuan Rp)

Sumber	2015	2016	2017	Jumlah	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	40.594.774	45.544.391	64.270.887	150.410.052	16,14
Hasil Retribusi Daerah	21.685.600	26.074.275	27.884.961	75.644.836	8,12
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.746.971	37.153.819	15.471.279	66.372.069	7,12
Lain-lain PAD yang Sah	154.407.868	166.685.568	318.266.140	639.359.576	68,62
Total PAD	230.435.213	275.458.054	425.893.267	931.786.534	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2018

Dari berbagai riset yang ada, menunjukkan bahwa telah terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan juga terjadi ketimpangan fiskal antar daerah. Hal itu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Bilamana hal tersebut terus terjadi, maka ketimpangan antar daerah akan semakin tinggi.

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang terpenting bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Seperti nampak pada Tabel 1.1, penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah Kabupaten Pemalang selama tahun 2015-2017 memberikan kontribusi sebesar 68,62% dari jumlah PAD. Pada sisi lain, penerimaan PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 7,12% dari total PAD. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada Badan Usaha Milik Daerah.

Masih rendahnya kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan masih belum optimalnya penerimaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD yang bersumber BUMD sangat diperlukan termasuk penambahan modal BUMD baru sehingga dapat lebih optimal dalam mencapai target. Pemerintah

Kabupaten Pemalang mempunyai penyertaan modal dengan kepemilikan tunggal pada PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

1.2 Tujuan

Secara umum tujuan dilakukan kajian ini adalah menilai kelayakan tambahan modal pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang. Secara khusus, studi ini bertujuan untuk: 1) Memberikan gambaran kondisi perusahaan 2). Memberikan gambaran pengembangan perusahaan di masa mendatang 3) Mengevaluasi kelayakan investasi tambahan modal pada PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

1.3 Kegunaan Studi

Kegunaan hasil penelitian ini adalah bermanfaat bagi pemangku kepentingan untuk mengembangkan perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dan menilai jumlah tambahan modal yang layak bagi PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Tahapan Studi Kelayakan Bisnis

Menurut Kasmir dan Jafkar (2012,p7), studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam layak tidaknya suatu investasi dilaksanakan dengan berhasil. Hal yang membedakan dengan *businessplan* terletak pada sumber data penelitian, penyusun penelitian, tujuan dari studi kelayakan dan rencana bisnis, waktu penelitian, dan biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing. Tahapan studi kelayakan meliputi Pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, Analisis data, Mengambil keputusan, Memberikan rekomendasi. Proses Pengumpulan data dan informasi berasal dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistika (BPS), Bank Indonesia (BI) ataupun internal perusahaan. Kegiatan pengolahan data dan informasi dilakukan dengan menggunakan metode dan ukuran yang digunakan. Analisis data untuk menentukan kelayakan berdasarkan kriteria yang dipakai. Keputusan diambil berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh. Tahap selanjutnya adalah memberi rekomendasi terhadap pihak yang berkepentingan terhadap studi kelayakan.

Menurut Suliyanto (2010) penyusunan studi kelayakan bisnis diarahkan pada tiga idea bisnis yang berkaitan dengan rintisan usaha baru, pengembangan usaha atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Rintisan usaha baru memerlukan studi kelayakan bisnis untuk memastikan layak tidaknya suatu investasi dijalankan. Pada pengembangan bisnis studi kelayakan diperlukan untuk meminimalisir terjadinya resiko di masa yang akan datang. Studi kelayakan dapat membantu untuk menentukan alternatif investasi yang paling menguntungkan. Tujuan penyusunan studi kelayakan antara lain untuk meminimalisir adanya resiko kerugian di masa yang akan datang, membantu perencanaan kebutuhan dana yang diperlukan, melaksanakan pekerjaan secara sistematis, monitoring dan pengendalian jalannya bisnis untuk mendeteksi penyimpangan secara dini.

2.2. Kriteria Kelayakan bisnis

Aspek Keuangan diarahkan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima, seberapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali, sumber pembiayaan bisnis, dan tingkat bunga yang berlaku. Kriteria kelayakan investasi ditentukan melalui pendekatan Payback Period, Average Rate of Return, Net Present Value, Internal Rate of return, Profitability Index.

2.2.1. Metode *Payback Period* (PP)

Analisis *Payback Period* merupakan kriteria yang berhubungan dengan penilaian jangka waktu (periode) pengembalian investasi. Standar waktu dihitung dengan membandingkan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan arus kas yang sesuai dengan investasi awal yang dilakukan. Rumus *Payback Period* (PP):

$$payback\ period = \frac{\text{jumlah investasi awal}}{\text{ arus kas}} \times 1\ \text{tahun}$$

Kriteria Pengambilan Keputusan:

- 1) Periode pengembalian lebih cepat maka Layak.

2) Periode pengembalian lebih lama maka Tidak Layak

Kriteria kelayakan pendekatan *Payback Period* diukur melalui *Payback Period* yang lebih pendek dibandingkan periode *payback* maksimum.

2.2.2. Net Present Value (NPV)

Analisis *Net Present Value* merupakan pendekatan yang menghubungkan dengan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih (*proceeds*) dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi (*outlays*). Kriteria NPV positif memberi indikasi *rate of return* minimum yang lebih besar dari keinginan yang telah ditetapkan, sehingga usulan investasi diterima. Rumus *Net Present Value* (NPV):

$$NPV = \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \frac{C_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{C_t}{(1+r)^t} - C_0$$

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+r)^t} - C_0$$

Semakin besar nilai NPV memberi indikasi keputusan yang lebih baik, karena mempunyai nilai yang positif terhadap peningkatan perusahaan.

2.2.3. Profitability Index

Analisis *Profitability Index* (PI) atau *Desirability Index* (DI) merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang (*proceeds*) dengan nilai sekarang investasi (*outlays*). Rumus *Profitability Index* (PI):

$$PROFIYABILITY INDEX (PI) = \frac{\text{Nilai aliran kas masuk}}{\text{nilai investasi}}$$

Kelayakan investasi menurut standar analisa ini adalah:

Jika $PI > 1$; maka investasi tersebut dapat dijalankan (*layak/feasible*)

Jika $PI < 1$; investasi tersebut tidak layak dijalankan (*tidak layak/not feasible*)

3. Internal Rate Of Return (IRR)

Analisis *Internal Rate of Return* (IRR) merupakan pendekatan untuk menentukan tingkat bunga dengan cara *trial and error* dalam menyamakan antara *present value* dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus *Internal Rate of Return* (IRR):

$$IRR = Ir + \frac{NPV Ir}{NPV Ir - NPV It} * (It - Ir)$$

Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode *Internal Rate of Return* (IRR) adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika *Internal Rate of Return* (IRR) lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika *Internal Rate of Return* (IRR) suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi maka pilih alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai *Internal Rate of Return* (IRR) yang paling besar.

Dasar pemikiran metode IRR adalah memberikan satu angka yang menyimpulkan manfaat dari suatu proyek. Angka yang dihasilkan tidak bergantung pada tingkat suku bunga yang merujuk pada pasar modal. Oleh karena itu, ini disebut dengan tingkat pengembalian internal, angka tersebut pada hakekatnya adalah nilai sebenar atas proyek dan tidak bergantung pada apapun kecuali *cash flow* proyek.

Kriteria IRR lebih besar dari tingkat diskon dan menolak proyek apabila IRR lebih kecil dari tingkat diskon. Karena dengan IRR yang lebih besar dari tingkat diskon berarti proyek akan memberikan NPV positif. Dengan melakukan perhitungan IRR maka dapat dilakukan pemeringkatan atas beberapa pilihan proyek yang dapat memberikan nilai IRR terbesar.

BAB III METODE PENELITIAN

Rancangan/desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan hubungan antar variabel secara intensif, terperinci terhadap PDAM Tirta Mulia Pematang.

3.1. Pendekatan Penelitian

Metoda pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah **juridis normatif dan kajian praktis**. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpul data kajian dokumen (*document review*). Dokumen dikutip dari sumber eksternal seperti Bagian

Perekonomian Kabupaten Pemalang dan data statistik Kabupaten Pemalang. Untuk melengkapi hal tersebut, data diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan termasuk data/informasi aktivitas pada PDAM Tirta Mulia Pealang

Dalam penelitian ini dikumpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, baik yang berupa rencana investasi maupun data sosial ekonomi yang sangat diperlukan. Hal itu penting dilakukan agar kajian investasi ini dapat menjadi pedoman investasi di masa depan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga dihasilkan landasan hukum yang benar dan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melakukan investasi terhadap BUMD.

3.2. Sumber Data

Berbagai jenis data digunakan yaitu meliputi: 1). Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian 2). Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi antara dua orang untuk memperoleh informasi yang berdasarkan pertanyaan yang diajukan dan Metode observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap obyek pada saat melakukan penelitian

3.3. Analisis

Pendekatan analisis melalui: 1). analisis deskriptif deskriptif dengan menggambarkan tambahan penyertaan modal secara kualitatif sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan investasi pada PDAM Tirta Mulia Kabupaten pemalang 2). Kajian atas laporan keuangan PDAM Tirta mulia Pemalang dan proyeksi yang akan dicapai dan potensi perkembangan usaha untuk masa yang akan datang 3). Analisis menghitung kelayakan aspek keuangan dari tambahan investasi dengan pendekatan DER, CR dan ROI 4). Analisis untuk menentukan kriteria tambahan investasi dengan menggunakan alat payback period, NPV, PI dan IRR

3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi kajian di PDAM Tirta Mulia Pemalang yang dilakukan bulan November 2018 sampai Bulan April 2019

BAB IV

ANALISIS POTENSI EKONOMI WILAYAH

Pada bab ini diuraikan hasil analisis potensi ekonomi wilayah Kabupaten Pemalang. Analisis pada bab ini bertujuan memberikan gambaran makro kondisi perekonomian daerah Kabupaten Pemalang yang merupakan lokasi tempat usaha Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pemalang. Analisis potensi wilayah ini meliputi gambaran umum kondisi daerah, analisis pertumbuhan ekonomi, analisis sektor ekonomi potensial, dan analisis demografi.

4.1.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km². Jenis tanah di Kabupaten Pemalang adalah Tanah Alluvial yang berada di dataran rendah, Tanah Regosol dan Tanah Lestisol yang berada di daerah bukit sampai gunung. Kabupaten Pemalang dilalui sungai yaitu Sungai Waluh, Sungai Comal dan Sungai Rambat. Di Kabupaten Pemalang juga terdapat mata air yaitu mata air Gunung Agung yang terletak di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang, mata air Telaga Gede yang terletak di Desa Sikasur Kecamatan Belik, dan mata air Asem yang terletak di Desa Bulakan Kecamatan Belik. Kabupaten Pemalang terbagi menjadi 14 kecamatan, 211 desa dan 11 kelurahan dengan 839 dukuh, 1.303 RW dan 6.453 RT.

Analisis aspek geografi di Kabupaten Pemalang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Pemalang.

Karakteristik Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 1.115,30 km². Total luas tersebut terdiri atas tanah sawah seluas 363,82 km², dan lahan bukan sawah seluas 751,48 km² dengan batasan wilayah:

- sebelah timur : Kabupaten Pekalongan
- sebelah barat : Kabupaten Tegal

- sebelah selatan : Kabupaten Purbalingga
- sebelah utara : Laut Jawa

Jumlah kecamatan, jumlah kelurahan/desa dan luas wilayahnya seperti tertera pada tabel 4.1. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bantarbolang diikuti dengan Kecamatan Watukumpul. Jumlah kelurahan/desa terbanyak terdapat di Kecamatan Taman dengan 21 desa.

Tabel 4.1. Kecamatan di Kabupaten Pemalang

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km ²)
1	Moga	10	41,40
2	Warungpring	6	26,31
3	Pulosari	12	87,52
4	Belik	12	124,54
5	Watukumpul	15	129,02
6	Bodeh	19	85,98
7	Bantarbolang	17	139,19
8	Randudongkal	18	90,32
9	Pemalang	20	101,93
10	Taman	21	67,41
11	Petarukan	20	81,29
12	Ampelgading	16	53,30
13	Comal	18	26,54
14	Ulujami	18	60,55
	Total	222	1.115,30

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang tahun 2018

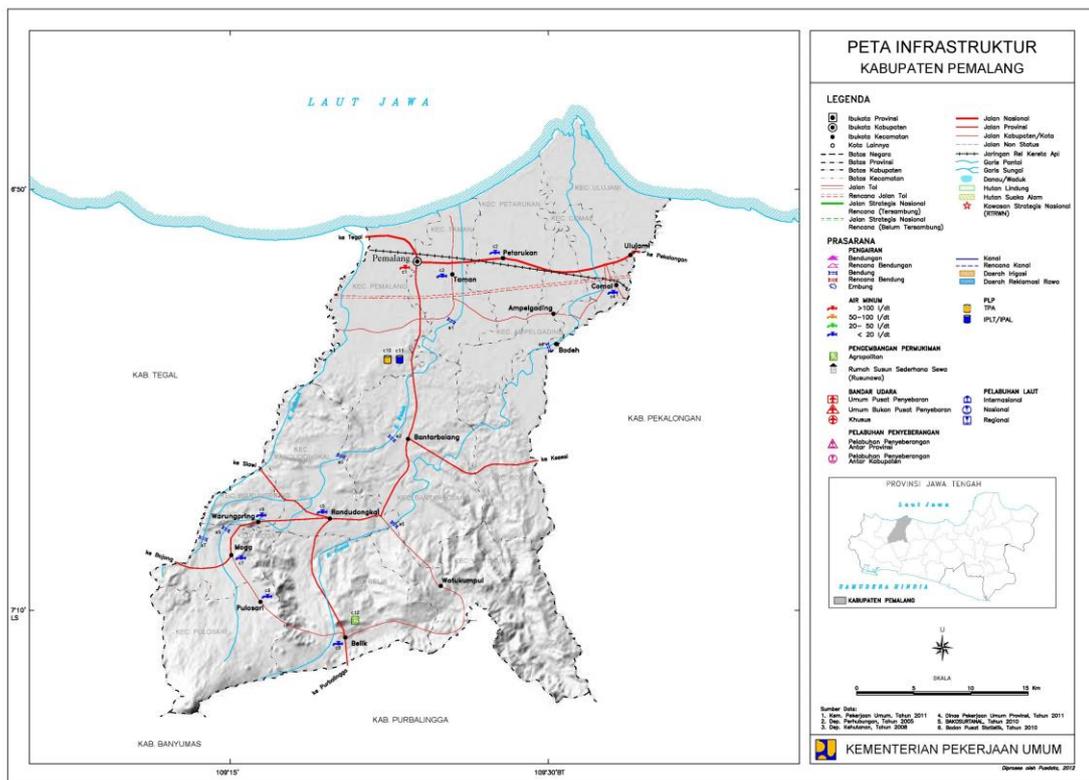
Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Pemalang terletak pada posisi geografis 109°17'30" - 109°40'30" Bujur Timur dan 8°52'30" - 7°20'11" Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Pemalang berada

pada jalur penghubung Pulau Jawa bagian utara (Pantura) sehingga posisinya menjadi sangat strategis.

Kabupaten Pemalang merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Pemalang 51,27% digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak dan kolam) dan hutan serta perkebunan. Sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan sementara tidak diusahakan.

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Pemalang dan Sekitarnya



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang

Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 1.115,32km². Total luas tersebut terdiri atas tanah sawah seluas 363,82km², tanah tegalan 157,91 km², perkebunan 50,06km², dan lahan untuk lain-lain (perumahan, fasilitas umum, industri, dsb) seluas 543,53 km².

4.1.2. Kondisi Demografi Kabupaten Pemalang

Pada bagian ini diuraikan analisis kondisi demografi Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten

Pemalang di tahun 2017 mencapai 1.296.272 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 641.572 jiwa (49,49%), dan penduduk perempuan sejumlah 654.700 jiwa (50,51%). Jumlah tersebut meningkat sebesar 3.699 jiwa (0,28%) dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2016 yang sebesar 1.292.573 jiwa.

Tabel 4.2.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	%	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	Moga	41,40	63.633	4,91	1.537
2	Warungpring	26,31	38.974	3,01	1.481
3	Pulosari	87,52	56.036	4,32	640
4	Belik	124,54	104.750	8,08	841
5	Watukumpul	129,02	64.948	5,01	503
6	Bodeh	85,98	54.684	4,22	636
7	Bantarbolang	139,19	72.129	5,56	518
8	Randudongkal	90,32	97.799	7,54	1.083
9	Pemalang	101,93	178.037	13,73	1.747
10	Taman	67,41	162.147	12,51	2.405
11	Petarukan	81,29	147.186	11,35	1.811
12	Ampelgading	53,30	66.653	5,14	1.251
13	Comal	26,54	89.033	6,87	3.355
14	Ulujami	60,55	100.263	7,73	1.656
	Total	1.115,32	1.296.272	100,00	1.390

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2016

Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk yang paling tinggi berada pada wilayah perkotaan antara lain meliputi Kecamatan Comal sebesar 3.355 jiwa/km² dan Kecamatan Taman sebesar 2.405 km².Secararinci jumlah kepadatan penduduk pada masing- masing wilayah kecamatan sebagaimana tabel 3.2, terlihat bahwa kepadatan paling rendah berada di wilayah kecamatan yang berada di wilayah yang merupakan wilayah selatan yang mempunyai kontur pegunungan yakni Kecamatan Watukumpul sebesar 503 jiwa/km², Kecamatan Bantarbolang sebesar 518 jiwa/km², dan Kecamatan Bodeh sebesar 636 jiwa/km².

Tabel 4.3 menyajikan data jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2014 sampai dengan 2017. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang dipengaruhi oleh proses alami yaitu kelahiran dikurangi kematian penduduk dan juga dipengaruhi migrasi penduduk dari daerah sekitar Kabupaten Pemalang.

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk				Jumlah Total	Pertumbuhan
		Laki-laki		Perempuan			
		(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)		
1	2017	641.572	49,49	654.700	50,51	1.296.272	0,29
2	2016	639.797	49,50	652.776	50,50	1.292.573	0,31
3	2015	637.858	49,50	650.708	50,50	1.288.566	0,34
4	2014	635.746	49,50	648.490	50,50	1.284.236	

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2018

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir yaitu pada rentang waktu Tahun 2014-2017 yaitu masing-masing tumbuh sebesar 0,34%, 0,31%, dan 0,29%. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan cenderung stabil yaitu sebesar 49,50% untuk laki-laki dan 50,50% untuk perempuan

4.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Pemalang

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, dan PDRB per kapita. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting kondisi perekonomian suatu daerah. Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) secara nasional, tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17% meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 5,07%. Perekonomian Jawa Tengah tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2017, PDRB tumbuh sebesar 5,27%, lebih kecil dari tahun 2015 dan 2016 yaitu tumbuh sebesar

5,47% dan 5,28%. Laju pertumbuhan Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 sebesar 5,39% dengan PDRB sebesar Rp16.297.654 juta rupiah.

Tabel 4.4.
PDRB Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2015-2017

jutaan Rp

Kategori	Uraian	2015	2016	2017
A	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	3.762.377	3.850.772	4.012.917
B	Pertambangan dan Pengeksploasian	656.263	715.206	752.008
C	Industri Pengolahan	3.014.904	3.185.813	3.296.225
D	Pengadaan listrik dan gas	15.566	22.419	24.391
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.936	13.284	13.794
F	Konstruksi	617.994	662.286	701.170
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.420.233	2.603.495	2.796.272
H	Transportasi dan Pergudangan	433.522	462.444	506.632
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	808.886	861.504	912.238
J	Informasi dan Komunikasi	360.877	383.544	411.732
K	Jasa Keuangan Asuransi	426.210	463.368	488.977
L	Real Estate	269.813	286.552	303.692
M, N	Jasa Perusahaan	52.360	55.942	59.864
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	498.970	505.060	522.124
P	Jasa Pendidikan	757.180	807.636	862.194
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.313	154.697	167.634
R, S, T, U	Jasa Lainnya	413.205	429.779	465.788
		14.664.609	15.463.801	16.297.654

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka Tahun 2018

PDRB dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Berdasar tabel 4.5 nampak industri pertanian dan pengolahan menjadi sektor yang paling dominan disusul dengan sektor perdagangan besar dan konstruksi. Data ini menunjukkan karakteristik Kabupaten Pemalang sebagai kota perdagangan dan pertanian.

Tabel 4.5.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2017

Kategori	Uraian	2015	2016	2017
A	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	4,05	2,33	3,94
B	Pertambangan dan Penggalian	2,85	8,98	8,17
C	Industri Pengolahan	7,29	5,65	2,82
D	Pengadaan listrik dan gas	-2,93	14,50	8,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,32	2,69	3,84
F	Konstruksi	5,58	7,17	7,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,43	7,57	7,40
H	Transportasi dan Pergudangan	5,44	6,55	9,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,57	6,50	5,89
J	Informasi dan Komunikasi	8,31	5,61	7,35
K	Jasa Keuangan Asuransi	8,23	8,51	5,53
L	Real Estate	7,13	6,20	5,98
M, N	Jasa Perusahaan	10,43	6,84	7,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,73	1,22	3,38
P	Jasa Pendidikan	8,51	6,66	6,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,68	7,94	8,36
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,38	4,01	8,38
		5,58	5,38	5,39

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 3.5 menyajikan data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tahun 2015-2017. Sejalan dengan kondisi makro ekonomi secara nasional, kondisi perekonomian Kabupaten Pemalang di tahun 2016 mengalami perlambatan. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 sebesar 5,39%, meningkat dari tahun 2016 sebesar 5,38%. Pertumbuhan ini lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

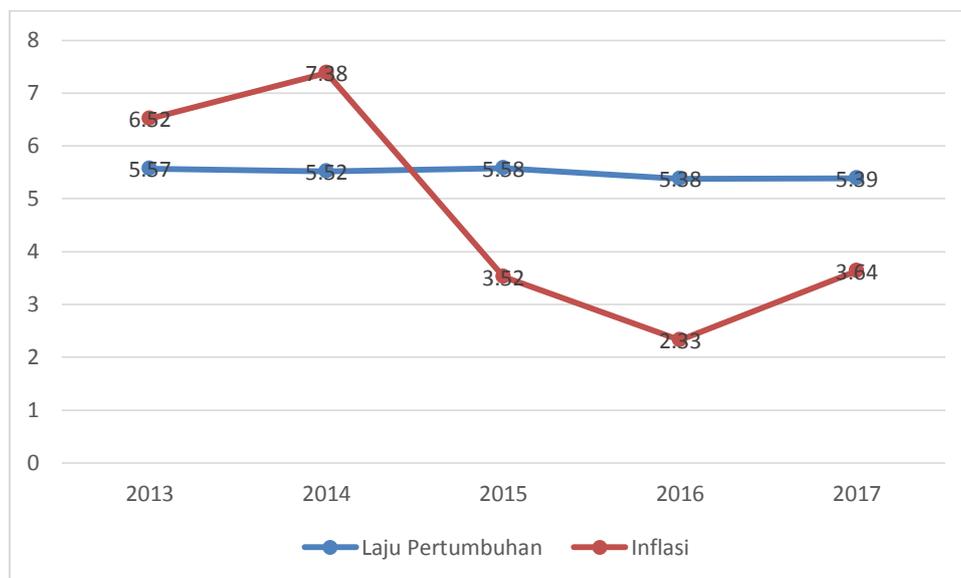
Inflasi

Pada bagian ini diuraikan data inflasi Kabupaten Pemalang. Inflasi menunjukkan terjadinya peningkatan harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat

adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Pemalang sangat dipengaruhi oleh kebijakan makro ekonomi dari Pusat yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Inflasi Kabupaten Pemalang di tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 7,38% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 6,52%. Untuk tahun 2016, inflasi Kabupaten Pemalang turun menjadi 2,33% dan pada tahun 2017 inflasi Kabupaten Pemalang meningkat menjadi 3,64%. Seperti terlihat dalam grafik di bawah ini (gambar 3.2):

Gambar 4.2
Laju Inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2018

Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut Ditinjau dari jumlah PDRB Perkapita (atas dasar harga berlaku) Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 nilai sebesar Rp11.380.565,00 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp11.963.580,00 dan di tahun 2017 nilainya meningkat menjadi Rp12.572.712,00. Peningkatan nilai

PDRB per kapita ini secara umum menandakan adanya tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang.

4.2. Kajian terhadap kondisi PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang

Penekanan lebih memfokuskan pada analisis kinerja keuangan dan potensi PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang dalam melakukan tambahan penyertaan modal.

4.2.1. Gambaran Umum PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mulia Kabupaten Pemalang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor: 6 Tahun 1993 tanggal 10 Februari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan diperbaharui terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

Tujuan pendirian perusahaan adalah memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar yang berlaku dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Petunjuk Pelaksanaan PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2009 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.

PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang berkantor Pusat di Jl. Gatot Subroto No. 30 Kabupaten Pemalang mempunyai 5 kantor cabang yaitu: 1). Kantor Cabang Pulosari 2). Kantor Cabang Moga 3). Kantor Cabang Randudongkal 4). Kantor Cabang Taman 5). Kantor Cabang Warungpring.

4.2.2. Kinerja Keuangan PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang

Kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang selama tiga tahun berturut-turut dapat dilihat dari neraca dan laporan laba-rugi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Neraca PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

KETERANGAN	31 DES 2016	31 DES 2017	31 DES 2018
Aset Lancar			
Kas dan Bank	1.571.974.531	12.360.649.681	15.383.798.343
Piutang Usaha	4.183.192.585	4.688.066.720	6.281.832.199
Penyisihan Piutang Usaha	(620.097.382)	(657.253.328)	(825.921.855)
	<u>3.563.095.203</u>	<u>4.030.813.392</u>	<u>5.455.910.344</u>
Piutang Lain-Lain	19.871.680	49.871.680	19.871.680
Persediaan			
Bahan Operasi	145.257.545	103.600.836	90.041.026
Bahan Instalasi	6.736.668.196	5.486.952.445	6.733.473.657
Jumlah Persediaan	<u>6.881.925.741</u>	<u>5.590.553.281</u>	<u>6.823.514.683</u>
Jumlah Aset Lancar	12.036.867.155	22.031.888.034	27.683.095.050
Aset Tetap			
Harga Perolehan	113.525.767.538	141.567.553.612	150.215.451.213
Akumulasi Penyusutan	<u>(34.264.113.691)</u>	<u>(40.581.143.209)</u>	<u>(47.867.108.105)</u>
Nilai Buku	79.261.653.847	100.986.410.403	102.348.343.108
Aset Dibatasi Penggunaannya	3.445.000	-	-
Uang Muka Pajak	-	478.302.419	478.302.419
Sewa Dibayar Dimuka	217.051.587	19.000.000	18.000.000
Sambungan Baru Yang Akan Diterima	464.428.595	404.228.595	507.578.595
Jumlah Aset	91.983.446.184	123.919.829.451	131.035.319.172
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Utang Usaha	7.105.047.580	10.172.375.150	2.677.582.263
Imbalan Paska Kerja Jangka Pendek	-	411.834.984	-
Utang Non Usaha	789.474.879	1.031.054.125	1.012.770.412
Utang Pajak	334.629.489	4.772.705	704.606.898
Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	-	1.095.186.225	-
Jumlah Kewajiban	8.229.151.948	12.715.223.189	4.394.959.573
Kewajiban Lain-Lain			
Jaminan Langganan	42.785.205	69.982.205	91.518.905
Cadangan Dana Meter	3.445.000	-	-
Kewajiban Dana Sosial dan Pendidikan	3.707.595.564	4.368.427.976	4.695.344.160
Kewajiban Dana Pensiun dan Sokongan	5.584.170.540	6.493.420.828	6.798.689.078
Jumlah Kewajiban Lain-lain	9.337.996.309	10.931.831.009	11.585.552.143
Ekuitas			
Modal Pemda Kabupaten	47.947.698.604	77.947.698.604	87.947.698.604
Penyertaan Pemerintah Pusat	14.732.252.954	14.732.252.954	14.732.252.954
Modal Hibah	962.317.000	962.317.000	1.162.117.000
Cadangan Umum	3.835.328.358	4.498.390.059	4.831.495.443
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja-OCI	-	(1.507.021.209)	-
Saldo Laba			
Laba Tahun Lalu	308.084.000	308.084.000	308.084.000
Laba Tahun Berjalan	6.630.617.011	3.331.053.845	6.073.159.455
Jumlah Ekuitas	74.416.297.927	100.272.775.253	115.054.807.456
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	91.983.446.184	123.919.829.451	131.035.319.172

Informasi neraca menunjukkan bahwa jumlah aset terus meningkat. Pada tahun 2016 jumlah aset sebesar Rp91.983.446.184,00 pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp123.919.829.451,00 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp131.035.319.172,00. Kas dan Bank mengalami kenaikan, pada tahun 2016 jumlah kas dan bank PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebesar Rp1.571.974.531,00, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp15.383.798.343,00. Kenaikan jumlah aset

karena penambahan aset tetap yaitu dari Rp113.525.767.538,00 pada tahun 2016, menjadi Rp150.215.451.213,00 pada tahun 2018.

Adapun perkembangan usaha dilihat dari pendapatan dan biaya dapat dilihat pada laporan laba-rugi sebagai berikut.

Tabel 4.7.
Laba Rugi PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2018

KETERANGAN	2016	2017	2018
Pendapatandan Beban Usaha			
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Air	29.342.206.200	30.287.113.400	39.372.275.300
Pendapatan Non Air	1.892.559.112	2.576.348.366	2.688.714.212
Jumlah Pendapatan Usaha	31.234.765.312	32.863.461.766	42.060.989.512
Beban Usaha			
Beban Pegawai	8.905.636.714	11.259.872.519	13.376.005.772
Beban Bahan Bakar	330.743.662	201.414.200	42.154.960
Beban Listrik	121.020.346	268.720.649	386.855.693
Beban Penyusutan	5.442.239.341	6.317.029.518	7.285.964.896
Beban Operasi	405.898.830	367.844.155	392.983.890
Beban Pemeliharaan	3.548.901.896	5.143.348.701	6.090.787.739
Beban OperasionalLainnya	4.721.203.771	5.336.206.404	6.847.236.022
Jumlah Beban Usaha	23.475.644.560	28.894.436.146	34.421.988.972
Laba Usaha	7.759.120.752	3.969.025.620	7.639.000.540
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha			
Pendapatan Di Luar Usaha	1.210.556.638	724.292.044	789.910.615
Beban Di Luar Usaha	(74.570.361)	(57.423.202)	(71.665.500)
Jumlah Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha	1.135.986.277	666.868.842	718.245.115
Laba Sebelum Pajak	8.895.107.029	4.635.894.462	8.357.245.655
Beban Pajak Penghasilan	(2.264.490.018)	(1.304.840.617)	(2.284.086.200)
Laba Bersih	6.630.617.011	3.331.053.845	6.073.159.455

Informasi dari laporan laba-rugi, secara profitabilitas perusahaan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 laba perusahaan sebesar Rp6.630.617.011,00. Pada tahun 2017, perusahaan mengalami penurunan menjadisebesar Rp3.331.053.845,00, dan padatahun 2018, laba perusahaan meningkat menjadi sebesar Rp6.073.159.455,00 hal itu menunjukkan laba bersih perusahaan mengalami peningkatan.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penurunan laba terjadi karena peningkatan beban gaji dan beban penyusutan. Selain itu, juga terjadi penurunan pendapatan di luar usaha dari Rp1.385.215.228,00 pada tahun 2016 menjadi Rp789.910.615,00 pada tahun 2018, serta beban pemeliharaan.

4.2.3. Modal PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang

Modal PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang berasal dari penyertaan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Pusat dan Hibah. Berikut adalah modal PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang:

Tabel 4.8.
Modal PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018
Modal Pemda Kabupaten	38.947.698.604	47.947.698.604	77.947.698.604	87.947.698.604
Penyertaan Pemerintah Pusat	14.732.252.954	14.732.252.954	14.732.252.954	14.732.252.954
Modal Hibah	265.117.000	962.317.000	962.317.000	1.162.117.000
Jumlah Modal	53.945.068.558	63.642.268.558	93.642.268.558	103.842.068.558

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan penyertaan modal dari Rp53.945.068.558,00 pada tahun 2015 menjadi Rp103.842.068.558,00 pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 48,05%. Jumlah penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Pemalang selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp49 miliar, dengan rincian pada tahun 2016 sebesar Rp9 miliar, tahun 2017 sebesar Rp30 miliar dan pada tahun 2018 sebesar Rp10 miliar.

4.2.4. Proyeksi Pendapatan PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah selaku pemilik BUMD harus menyesuaikan badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka Modal dasar PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang juga ikut berubah, dan modal dasar PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang direncanakan sebesar Rp200 miliar. Saat ini komposisi modal dasar dan modal disetor PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 adalah sebesar Rp87.947.698.604,00 atau sebesar 43,97%, sehingga masih ada 56,03% dan akan dipenuhi Pemerintah Kabupaten Pemalang secara bertahap.

Tabel 4.9.
Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pemalang

KETERANGAN	TAHUN I	TAHUN II	TAHUN II
Modal Dasar	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
Penyertaan Pemerintah	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

Modal disetor	89.947.698.604	91.447.698.604	92.947.698.604
---------------	----------------	----------------	----------------

Dari tabel di atas menunjukkan rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang selama 3 tahun dengan masing-masing sebesar Rp2 miliar, Rp1,5 miliar dan Rp1,5 miliar. Dengan tambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga dapat memperoleh tambahan pelanggan masing-masing sebesar 2.200 pelanggan, 2.500 pelanggan dan tahun ke tiga sebanyak 2.500 pelanggan.

Proyeksi pendapatan dan beban usaha PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang selama 3 tahun ke depan.

Tabel 4.10.
Proyeksi Pendapatan PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang

KETERANGAN	TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III
Pendapatan Dan Beban Usaha			
Pendapatan Usaha			
Pendapatan Air	42.756.589.065	46.551.918.518	50.673.264.444
Pendapatan Non Air	3.318.149.923	4.046.557.419	4.848.885.290
Jumlah Pendapatan Usaha	46.074.738.988	50.598.475.937	55.522.149.734
Beban Usaha			
Beban Pegawai	14.713.606.349	16.184.966.984	17.803.463.683
Beban Bahan Bakar	42.998.059	43.858.020	44.735.181
Beban Listrik	425.541.262	468.095.389	514.904.927
Beban Penyusutan	7.650.263.141	8.032.776.298	8.434.415.113
Beban Operasi	400.843.568	408.860.439	417.037.648
Beban Pemeliharaan	6.699.866.513	7.369.853.164	8.106.838.481
Beban Operasional Lainnya	7.531.959.624	8.285.155.587	9.113.671.145
Jumlah Beban Usaha	37.465.078.516	40.793.565.881	44.435.066.177
Laba Usaha	8.609.660.471	9.804.910.056	11.087.083.557
Pendapatan (Beban) Di Luar Usaha			
Pendapatan Di Luar Usaha	750.415.084	712.894.330	677.249.614
Beban Di Luar Usaha	(73.098.810)	(74.560.786)	(76.052.002)
Jumlah Pendapatan (Beban) di Luar Usaha	677.316.274	638.333.544	601.197.612
Laba Sebelum Pajak	9.286.976.745	10.443.243.600	11.688.281.168

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun pertama pendapatan air diproyeksi sebesar Rp42.756.589.065,00, pendapatan non air diproyeksi sebesar Rp3.318.149.923,00. Beban usaha yang terdiri dari beban pegawai, beban penyusutan dan beban operasional diproyeksi sebesar Rp37.465.078.516,00,

pendapatan bersih diluar usaha diproyeksi sebesar Rp677.316.274,00, sehingga laba sebelum pajak diproyeksi sebesar Rp9.286.976.745,00.

Pada tahun kedua, pendapatan usaha diproyeksi sebesar Rp50.598.475.937,00, sedangkan beban usaha diproyeksi sebesar Rp40.793.565.881,00, dan laba sebelum pajak diproyeksi sebesar Rp10.443.243.600,00. Pada tahun ketiga, pendapatan usaha diproyeksi sebesar Rp55.522.149.734,00, sedangkan beban usaha diproyeksi sebesar Rp44.435.066.177,00, dan laba sebelum pajak diproyeksi sebesar Rp11.688.281.168,00.

Tabel 4.11.
Proyeksi Rasio Keuangan PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang

KETERANGAN	TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III
DER	11,44	12,29	14,37
CR	182,43	164,88	138,45
ROE	7,68	8,31	8,94

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio DER terus meningkat, pada tahun pertama sebesar 11,44%, pada tahun kedua sebesar 12,29%, dan pada tahun ketiga sebesar 14,37%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban perusahaan terus mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari persentasi total kewajiban terhadap total modal, masih tergolong rendah dan hanya seperdelapan dari total modal, sehingga total kewajiban masih berada di bawah total modal.

Rasio Cash Ratio mengalami penurunan, pada tahun pertama sebesar 182,43%, pada tahun kedua sebesar 164,88% dan pada tahun ketiga sebesar 138,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kas dan bank perusahaan masih mampu membayar total kewajiban, namun dilihat dari persentasi pertumbuhan kewajiban lebih tinggi daripada pertumbuhan kas dan bank.

Rasio ROE mengalami peningkatan, pada tahun pertama sebesar 7,68%, pada tahun kedua sebesar 8,31% dan pada tahun ketiga sebesar 8,94%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian modal terhadap laba perusahaan mengalami peningkatan, meskipun rasio ROE masih di bawah 10%, namun karena PDAM termasuk dalam perusahaan umum yang melayani kebutuhan air bersih terhadap masyarakat sehingga dengan ROE sebesar 8,94% sudah baik.

4.3. Kelayakan Penyertaan Modal

4.3.1. Payback Period

Metode *payback period* digunakan untuk mengukur seberapa cepat investasi dapat kembali dalam satuan waktu, maka dasar yang digunakan adalah aliran kas, bukan laba. Aliran kas tahun pertama Rp 632.072.594, tahun kedua Rp 955.512.622 dan untuk tahun selanjutnya Rp 1.342.268.257. Jumlah tambahan investasi sebesar Rp 5.000.000.000, maka tingkat pengembalian diperlukan waktu 4 tahun 7 bulan.

4.3.2. Analisis Net Present Value

Hasil perhitungan metode NPV menunjukkan nilai positif sebesar Rp 2.282.392.201 pada discount faktor 10%. Faktor yang mendukung kelayakan usaha adalah PDAM Tirta Mulia Pemalang telah memiliki ketrampilan untuk memberi pelayanan yang lebih baik, dengan adanya penambahan pelanggan.

4.3.3. Profitability Index

Profitability index digunakan untuk mengukur perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih dimasa datang dengan nilai sekarang investasi. Hasil perhitungan sebesar 1,46 lebih besar dari 1, maka tambahan investasi dinyatakan layak.

4.3.4. Internal Rate Of Return (IRR)

Hasil perhitungan IRR sebesar 21,68% memiliki nilai lebih besar dari 10% maka dapat dikatakan bahwa investasi layak untuk dilaksanakan.

Dari metode analisis di atas yang di pakai dapat di simpulkan bahwa tambahan investasi bisa di terima atau di lanjutkan

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini diuraikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kajian pada bab-bab sebelumnya.

Kajian investasi BUMD Kabupaten Pemalang sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewenangan

penambahan modal BUMD, untuk melakukan penambahan modal BUMD Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan kajian analisis investasi.

Kajian ini menguraikan rencana permodalan BUMD apabila Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penambahan modal kepada BUMD. Rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap BUMD adalah untuk PDAM Tirta Mulia Kab. Pemalang Tahun I sebesar Rp 2.000.000.000, tahun ke 2 sebesar Rp 1.500.000.000 dan tahun ke 3 sebesar 1.500.000.000. Modal disetor Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pemalang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

NPV menunjukkan nilai positif Rp 2.282.392.201 pada discount faktor 10% didukung adanya kemampuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik, dengan adanya penambahan pelanggan. Profitability Index sebesar 1,46 lebih besar dari 1, maka tambahan investasi dinyatakan layak. Internal Rate Of Return (IRR) 21,68% memiliki nilai lebih besar dari 10% maka dapat dikatakan bahwa investasi layak untuk dilaksanakan. Dari metode analisis di atas yang di pakai dapat di simpulkan bahwa tambahan investasi bisa di terima atau di lanjutkan

DAFTAR PUSTAKA

Freddy Rangkuti. 2012. Studi Kelayakan Bisnis & Investasi. Gramedia Pustaka Utama.

Kasmir & Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Cetakan ke Delapan. Jakarta: Kencana, Jakarta

Suliyanto. 2010. Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Praktis. Andi Offset. Yogyakarta.

Kabupaten Pemalang dalam Angka dan Statistik perkembangan ekonomi, demografi, pariwisata, dan sebagainya dari Badan Pusat Statistik (BPS);

Laporan realisasi PAD;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang;

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang kewenangan daerah, dan Perda-Perda lain yang relevan;

Profil BUMD Kabupaten Pemalang;

Data laporan keuangan masing-masing BUMD Kabupaten Pemalang;